

## PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL

Arif Fajrianto, Surya Raharja<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The aim of this study is to examine the role of corporate governance in intellectual capital disclosure. This study uses firm size, leverage and return on asset as a control variable. The population in this study consists of manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange for the period 2016 - 2018. Sample determined with purposive sampling method. Total sample of this research are 327 companies. This study used multiple regression analysis for hypotheses testing. The results of this study show that board size and government ownership has positive and significant effect on intellectual capital disclosure. Meanwhile, the proportion of independence, blockholder ownership, board tenure has no effect on intellectual capital disclosure.*

*Keywords: Corporate Governance, intellectual capital Disclosure, Board Characteristic, Ownership Structure.*

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan konvensional perusahaan menjadi dasar untuk menyuarakan pengambilan keputusan investasi. Kesejahteraan pasar, dan investor langsung bergantung pada informasi yang disediakan dalam laporan keuangan (CFA, 2007). Meskipun penting, pernyataan ini memiliki kekurangan dari perspektif pasar modal (Schuster & O'Connell, 2006). Sebagai contoh, banyak perusahaan yang terdaftar didorong oleh penciptaan dan penggunaan aset tidak berwujud, seperti modal intelektual (IC). Aset yang penting ini berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing perusahaan (OECD, 2012). Kemudian, Guthrie dan Petty (2000) beranggapan bahwa aset tidak berwujud, termasuk IC memiliki potensi untuk meningkatkan pasar modal secara efisien. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan IC, pelaporan keuangan tradisional tidak menyajikan kerangka kerja untuk pengungkapan tersebut (CFA, 2007). Untuk menghadapi keterbatasan ini, Petty & Cuganesan (2005) menyatakan bahwa informasi ini dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan, untuk mewujudkan kebutuhan informasi pemangku kepentingan yang lebih layak. Dampaknya, banyak perusahaan dalam upaya mewujudkan permintaan pasar untuk informasi yang lebih andal, telah mulai secara sukarela menyempurnakan pelaporan keuangan tradisional mereka dalam wujud narasi, non-keuangan (Abeysekera & Guthrie, 2005; Haji & Ghazali, 2013). Beberapa penelitian mengenai tingkat pengungkapan modal intelektual yang dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan telah banyak dilakukan oleh (Alfraih, 2018), (Li *et al.*, 2008) dan (Hidalgo *et al.*, 2011). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manajer menerapkan informasi perusahaan, seperti IC. Secara umum mereka menemukan bahwa pengungkapan sukarela dimotivasi oleh keinginan perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga mengurangi biaya hutang atau modal perusahaan (Healy & Palepu, 2001). Hal ini menjadi menarik untuk peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa fungsi pemantauan dari tata kelola perusahaan secara signifikan memengaruhi tingkat dan kualitas pengungkapan (Elshandidy & Neri, 2015). Tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme kontrol yang dirancang untuk memantau dan menetapkan keputusan manajerial, dan untuk memastikan operasi perusahaan yang efisien atas nama pemangku kepentingannya (Donnelly & Mulcahy, 2008). Dalam hal ini, Kothari (2005)

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

berpendapat bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas mekanisme tata kelola perusahaan, tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas standar akuntansi. Demikian pula, Donnelly & Mulcahy (2008) berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dapat secara sukarela meningkatkan tingkat pengungkapan perusahaan.

Fenomena IC di Indonesia sendiri mulai berkembang ketika peraturan mengenai aktiva tidak berwujud yang tertuang di dalam (PSAK No 19, 2009). Menurut PSAK No 19 (2009), aktiva tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dimiliki perusahaan dan dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini bermanfaat untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi. Aktiva tidak berwujud diakui apabila perusahaan berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi di masa datang. Selain itu, aktiva tidak berwujud juga diakui apabila biaya-biaya dalam perolehannya dapat diukur dengan andal. Namun, dalam regulasi yang terdapat dalam PSAK No. 19 (revisi 2015) tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan sehingga menyebabkan terjadinya information gap (Sinaga dan Sudarno, 2018).

Kemudian, Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-43/BL/2012 menetapkan keputusan mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam pernyataan tersebut, perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang salah satunya memuat mengenai mekanisme tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti ingin membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, maka akan lebih banyak mengungkapkan informasi secara sukarela, termasuk pengungkapan IC. Namun saat ini, mengenai pengukuran dan pelaporan IC di Indonesia belum ada peraturan khususnya (Widiyaningrum, 2004).

Belum adanya standar yang baku mengenai pengungkapan modal intelektual menyebabkan belum semua perusahaan melakukan pengungkapan modal intelektual di laporan keuangan. Menurut Williams (2001) kenyataannya berdasarkan survei pada tahun 1998 yang dilakukan *Taylor and Associates*, salah satu jenis informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan adalah pengungkapan modal intelektual. Jika perusahaan tidak mengungkapkan mengenai modal intelektual yang dimiliki, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan informasi diantara pengguna laporan keuangan. Berdasarkan saran Wallman (1995) dalam Purnomosidhi (2006) kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan dapat terpenuhi apabila perusahaan secara sukarela mengungkapkan modal intelektual.

Untuk menilai efektivitas dan meningkatkan nilai perusahaan, penting memahami faktor-faktor seperti karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan pada pengungkapan IC. Karakteristik dewan komisaris sendiri ditunjukkan oleh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan masa jabatan dewan komisaris. Sementara untuk struktur kepemilikan ditunjukkan oleh kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan pemerintah. Untuk masa jabatan dewan komisaris itu sendiri, belum ada penelitian terdahulu yang menguji pengaruh antara masa jabatan dewan komisaris dan pengungkapan IC. Pengungkapan CSR bersifat sukarela digunakan sebagai proksi dari pengungkapan IC. Vafeas (2003) menjelaskan bahwa dewan yang memiliki masa jabatan yang lebih lama akan memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai perusahaan dan perubahan di dalam lingkungan bisnis. Sedangkan menurut Byrd *et al.* (2010) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang antara dewan komisaris dengan direksi akan mengurangi efektivitas pengawasan ke manajemen. Oleh karena masih terdapat hasil yang kontradiktif mengenai pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap perusahaan, maka masa jabatan dewan komisaris menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Penelitian dimulai dengan tinjauan literatur mengenai pengungkapan sukarela, tata kelola perusahaan. Kemudian, kerangka penelitian didasari oleh pengembangan dari teori agensi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja yang dipublikasikan oleh *International Federation of Accountant* (IFAC, 1998). Dalam beberapa studi IC, kerangka kerja ini telah berhasil digunakan. Kerangka kerja ini terdiri dari 3 kategori dan 24 komponen. Tiga kategori tersebut adalah: modal internal, modal eksternal, dan modal manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Abeysekera (2010) meneliti pengaruh ukuran dewan pada pengungkapan IC dalam sampel perusahaan yang terdaftar di Kenya, dan menemukan bahwa IC lebih luas dikaitkan dengan dewan yang lebih besar. Menggunakan sampel dari Australia, White *et al.* (2007) dengan jelas mengamati bahwa pengungkap didorong oleh teori agensi, dan terkait dengan masalah tata kelola perusahaan kontemporer. Mereka mengamati adanya hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan IC dan independensi dewan.

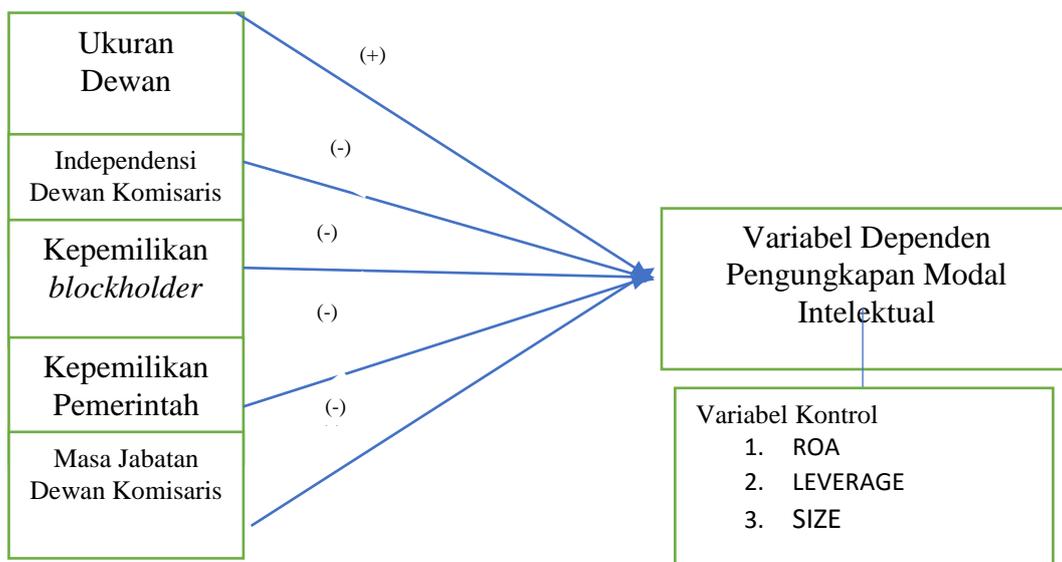
Berfokus pada keefektivitasan dewan, Cerbioni & Parbonetti (2007) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam pengungkapan IC dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Eropa. Mereka memperoleh informasi bahwa keanggotaan dewan komisaris, struktur, dan kepemimpinan berhubungan negatif dengan pengungkapan IC, sementara itu proporsi direktur independen berhubungan positif. Kebalikannya, Rodrigurs *et al.* (2016) mengamati bahwa dengan adanya peningkatan keanggotaan dewan komisaris pengungkapan IC akan meningkat, akan tetapi cenderung menurun dengan adanya peningkatan dualitas CEO dan proporsi yang lebih tinggi dari direktur independen dalam sampel mereka di Portugis.

Serupa dalam hal yang terjadi di Portugal, Oliveira *et al.* (2006) menunjukkan hasil secara empiris bahwa perusahaan dengan konsentrasi pemegang saham yang lebih rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi IC. Mereka mengungkapkan temuan ini dengan mencatat bahwa biaya agensi meningkat karena struktur kepemilikan menjadi lebih tersebar dikarenakan kemungkinan meningkatnya konflik kepentingan. Hal ini memotivasi perusahaan – perusahaan tersebut untuk secara sukarela mengungkapkan informasi untuk mengurangi biaya. Hidalgo *et al.* (2011) mengkonfirmasi temuan ini. Berdasarkan sampel dari Mexico, mereka secara empiris mendokumentasikan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan IC, mendukung hipotesis yang dibuat. Dalam konteks yang terjadi di Singapura, Firer dan Williams (2005) mengamati bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, perusahaan dengan kepemilikan direktur eksekutif yang tinggi, dan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang rendah kurang memiliki motivasi untuk mengungkapkan IC dari rekan-rekan mereka.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan metode pengujian hipotesis serta hubungan masing – masing variabel. hal tersebut diilustrasikan pada gambar 1.1

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Ukuran dewan mengukur berapa jumlah dewan komisaris. Fama & Jensen, (1983) mengungkapkan bahwa jumlah ini dapat mempengaruhi bagaimana direktur-direktur menjalankan tanggung jawab mereka. Dilihat dari perspektif teori agensi, dapat dikatakan bahwa dewan yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mendeteksi masalah agensi, hanya karena menawarkan keahlian yang lebih besar, pengawasan manajemen dan akses ke berbagai sumber daya yang lebih luas. Bukan itu saja, jumlah direktur yang besar dapat mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi karena akan ada lebih banyak orang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (Fauzi & Locke, 2012).

Di Indonesia, pada Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 tahun 2014 menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang dari 2 orang anggota dewan komisaris dan 1 orang anggotanya merupakan komisaris independen. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris yang lebih besar diharapkan berhubungan yang lebih signifikan dengan pengungkapan IC, karena mengingat dengan lebih banyak jumlah anggota dewan komisaris dapat meningkatkan efektifitasnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berhipotesis:

H1: Ukuran dewan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan IC

### **Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Komposisi dewan independen merupakan mekanisme penting dalam konflik agensi internal (Fama & Jensen, 1983). Representasi eksternal yang lebih besar sering dianjurkan, karena orang-orang ini cenderung lebih objektif dalam memantau tindakan manajemen (Sundaramurthy *et al.*, 1997). Li (1994) berpendapat bahwa pengontrolan keputusan merupakan fungsi utama dewan, dan independensi dewan komisaris memiliki tanggung jawab khusus untuk membela kepentingan pemegang saham dan memantau perilaku manajemen.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, dkk (2014) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual karena dalam praktiknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen, sehingga walaupun dewan komisaris independen telah ada namun tidak diketahui bagaimana penunjukkannya. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rodrigues *et al.* (2016) dan Ousama *et al.* (2012), mereka menemukan adanya pengaruh yang negatif signifikan antara independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis:

H2: Independensi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan IC

### **Pengaruh Kepemilikan Blockholder terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Jensen, (1993) berpendapat bahwa struktur kepemilikan merupakan unsur penting dalam pengendalian dan tata kelola perusahaan. Sumber daya dan keahlian mereka berarti bahwa pemilik blok besar saham memiliki motivasi yang lebih besar untuk memantau dan mendisiplinkan manajer untuk mengatasi masalah kebebasan dalam bertindak yang dihasilkan dari kepemilikan yang tersebar (Shleifer & Vishny, 1986). White *et al.*, (2007) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang rendah dapat disamakan dengan kontrol manajerial, sebaliknya dapat disamakan dengan kontrol dari pemilik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh White *et al.* (2007) yang mengungkapkan bahwa dengan kepemilikan blok yang lebih besar memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual, mereka menyatakan bahwa mungkin *blockholder* tidak melobi manajemen dan dewan untuk akuntabilitas yang lebih besar yang menyebabkan masalah agensi. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka penelitian ini berhipotesis:

H3: Kepemilikan blockholder memiliki pengaruh negatif terhadap Pengungkapan IC

### **Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Eng & Mak (2003) mengartikan kepemilikan pemerintah sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah dan institusi terkait pemerintah. Firer dan Williams (2005) berpendapat bahwa kepemilikan secara signifikan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan, termasuk yang terkait dengan IC. Mereka mengklaim bahwa direktur perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih fokus pada kebijakan seperti pengembangan sumber daya manusia dan IC yang bermanfaat bagi negara secara keseluruhan. Direktur tersebut menggunakan pengungkapan sukarela untuk

memberikan petunjuk kepada otoritas dan masyarakat luas bahwa mereka telah mengimplementasikan kebijakan pemerintah sesuai bidang-bidangnya.

Mengingat besarnya tekanan pemerintah dan publik membuat perusahaan harus lebih transparan akuntabilitasnya dalam manajemennya maka perlu dilakukan pengungkapan informasi yang lebih luas mengenai sumber daya perusahaan, termasuk IC yang berkaitan erat dengan penciptaan nilai perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini berhipotesis:

H4: Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

#### **Pengaruh Masa Jabatan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Kajian mengenai masa jabatan dewan komisaris masih memiliki jumlah yang terbatas dan memberikan bukti yang kontradiktif terkait dampak masa jabatan pada dewan di perusahaan. Vafeas (2003) menjelaskan bahwa dewan dengan jabatan yang lebih panjang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai perusahaan dan perubahan lingkungan bisnisnya. Di sisi lain, hubungan yang baik dengan manajemen akan membuat dewan kurang efektif dalam memantau perilaku manajemen. Byrd *et al.* (2010) menyatakan bahwa hubungan jangka panjang antara dewan komisaris dan direksi akan meningkatkan masalah agensi dan dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan ke manajemen. Berberich & Niu (2011) menemukan bahwa dewan yang memiliki masa jabatan yang panjang memiliki konsekuensi negatif bagi tata kelola, karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap eksekutif.

Penelitian tentang pengaruh masa jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan sosial perusahaan memiliki gejala yang sama dengan pengungkapan IC yang menunjukkan hasil bahwa masa jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR bersifat voluntary (Handajani *et al.*, 2014). Penelitian tersebut mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (2003) dan Byrd *et al.*, (2010). Oleh karena itu penelitian ini berhipotesis bahwa:

H5: Masa jabatan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan IC

### **METODE PENELITIAN**

#### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual. Whiting & Miller, (2008) meninjau kembali studi tentang pengungkapan IC dan faktornya, serta melaporkan bahwa analisis mengenai isi laporan hampir selalu digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan IC. Pendekatan ini melibatkan kodifikasi informasi kualitatif dan kuantitatif ke dalam kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan pola dalam penyajian dan pelaporan informasi (Guthrie *et al.*, 2004). Teknik ini biasanya mengharuskan manusia untuk memberikan kode elemen terhadap kerangka kerja pengungkapan IC yang ditemukan dalam laporan perusahaan (Lee & Guthrie, 2010). Teknik ini dapat diterapkan dalam beberapa cara. Cara-cara tersebut termasuk menghitung kata kunci, kalimat atau bagian, atau membaca keseluruhan teks (Gamerschlag, 2013). Namun, Li *et al.* (2008) berpendapat bahwa karena kata kunci merupakan unit pengukuran terkecil, kata kunci tersebut memberikan hal yang paling maksimal. Mengikuti karya sebelumnya (Gamerschlag, 2013), dalam penelitian ini ukuran yang digunakan adalah kemunculan kata kunci yang ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Kata kunci didefinisikan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Sveiby (1997) dan dimodifikasi oleh Guthrie *et al.*, (2004), yang telah digunakan dengan berhasil dalam beberapa studi IC (Whiting & Miller, 2008; Branco *et al.*, 2010). Kerangka tersebut memiliki tiga kategori dan 24 komponen. Tiga kategori IC tersebut adalah: modal internal, eksternal dan sumber daya manusia. Kerangka kerja lengkap ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Modal Intelektual**

<b>Modal Internal</b>	<b>Modal Eksternal</b>	<b>Modal Manusia</b>
Hak Kekayaan Intelektual	Merk	Pendidikan
Budaya Perusahaan	Pelanggan	Keterampilan
Paten/Hak Cipta/ <i>Merk</i> Dagang	Nama Perusahaan	Kompetensi/Pengetahuan relasi kerja
Sistem Informasi	Kepuasan Pelanggan	Kualifikasi Akademik
Sistem Jaringan	Loyalitas Pelanggan	Kualifikasi Profesional
Proses Manajemen	Jaringan Distribusi	Modal Manusia/Sumber Daya
Filosofi Manajemen	Kolaborasi Bisnis	Semangat Kewirausahaan, Kemampuan Berinovasi, Proaktif dan Reaktif, Kemampuan untuk Berubah
Hubungan Finansial	Perjanjian Lisensi	Pelatihan SDM

Untuk mengukur tingkat pengungkapan IC, studi empiris sebelumnya (Guthrie & Petty, 2000; Li *et al.*, 2008; Abeysekera, 2010; Haji & Ghazali, 2013) telah menggunakan pendekatan dikotomis (tidak memiliki bobot). Dalam pendekatan ini, nilai “0” digunakan untuk *non-disclosure* dan nilai “1” diberikan jika item tersebut muncul. Cooke (1989) berpendapat bahwa pendekatan ini lebih objektif daripada pendekatan tertimbang yang memberikan semua item yang sama pentingnya. Demikian pula, Abeysekera, (2010) berpendapat bahwa menetapkan bobot untuk berbagai jenis pengungkapan IC dapat menyebabkan kesalahan karena penskalaan bias. Konsisten dengan pekerjaan sebelumnya, dalam penelitian ini setiap item pengungkapan IC diberi bobot yang sama. Setiap perusahaan, Laporan tahunan perusahaan diperiksa oleh peneliti untuk mengidentifikasi kemunculan 24 kata kunci dan skor dicatat pada lembar kode. Untuk masing-masing perusahaan, skor total pengungkapan dihitung dan sebuah indeks yang dirancang untuk mengukur tingkat pengungkapan relatifnya. Indeks tersebut adalah rasio skor pengungkapan yang aktual dari perusahaan dengan jumlah maksimum yang dimungkinkan (yaitu, 24).

Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran dewan. Alfraih (2018) berpendapat bahwa untuk mengukur variabel ini menggunakan pengukuran yang umum yaitu dengan menjumlahkan dewan komisaris pada perusahaan.

Variabel selanjutnya yaitu Independensi dewan komisaris. Independensi dewan komisaris mengacu pada campuran antara direksi internal (eksekutif) dan eksternal (non-eksekutif). Untuk mengukurnya variabel ini menggunakan pengukuran yang umum untuk independensi dewan komisaris. Untuk mengukur independensi dewan komisaris presentase dari komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris (Alfraih, 2018)

Kemudian variabel ketiga dalam penelitian ini adalah kepemilikan *blockholder*. Kepemilikan *blockholder* merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki *blockholder* setidaknya 5% dari jumlah saham beredar. Proporsi dari saham biasa yang dimiliki blokir paling sedikit 5% dari jumlah saham yang diterbitkan digunakan untuk mengukur kepemilikan *blockholder* (Alfraih, 2018)

Lalu, variabel keempat dalam penelitian ini yaitu kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemerintah dan institusi terkait pemerintah (Eng dan Mak, 2003). Proporsi dari saham biasa yang dimiliki pemerintah paling sedikit 5% dari jumlah saham yang diterbitkan (Alfraih, 2018)

Variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu masa jabatan dewan komisaris. Untuk mengukur variabel ini menggunakan jumlah rata-rata jangka waktu dewan komisaris bekerja di dalam perusahaan (Handajani *et al.*, 2014)

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai fokus dari penelitian ini karena perusahaan tersebut memiliki berbagai ragam sub sektor industri. Perusahaan manufaktur dituntut untuk selalu berinovasi dan memiliki strategi serta memiliki teknologi untuk pengembangan produk yang dihasilkan, sehingga penting untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan organisasi perusahaan. Maka dari itu penilaian kinerja modal intelektual sangat diperlukan dalam perusahaan manufaktur.

Dalam penelitian ini teknik *purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel yaitu mengambil sampel berdasarkan ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang sudah ditentukan sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kriteria dalam menentukan sampel penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2016-2018
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan
4. Memberikan data yang peneliti butuhkan untuk mengukur variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol yang ditetapkan pada penelitian ini.

Metode Analisis dan Uji hipotesis

Kedua hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan uji regresi berganda. Selain dapat mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IC = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 OUT + \beta_3 BLOCK + \beta_4 GOV + \beta_5 BTENURE + \epsilon_i$$

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018. Terdapat 124 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 menjadi sampel penelitian ini. Sampel penelitian tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu perusahaan yang memiliki laporan tahunan selama 3 tahun yaitu 2016-2018 dan memiliki data keuangan. Data penelitian yang tidak memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian akan dieliminasi dari sampel penelitian.

**Tabel 1.2**  
**Data Hasil Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018	427
2	Perusahaan manufaktur yang memiliki data informasi kurang lengkap	55
3	Perusahaan manufaktur yang layak dijadikan sampel	372

**Analisis Data Statistik Deskriptif**

	ICD	BFSIZE	OUT	BLOCK	GOV	BTENURESIZE	LEV	ROA
Mean	0.612399	4.158602	0.416842	0.707149	0.025161	6.989219	28.67736	0.076466
Median	0.583333	3.000000	0.400000	0.774200	0.000000	5.562518	28.45324	0.465733
Maximum	1.000000	13.00000	0.800000	1.000000	0.807000	28.50000	33.51964	5.073297
Minimum	0.166667	2.000000	0.250000	0.000000	0.000000	0.500000	24.41992	0.044388
Std. Dev.	0.196178	1.778611	0.107179	0.226641	0.126298	5.100559	1.665368	0.489604
Skewness	-0.007198	1.123975	1.350028	-1.500496	5.276816	1.514805	0.479853	6.181848
Kurtosis	2.295874	4.731343	4.964242	5.253356	30.11581	5.333645	3.017168	54.11453
Jarque-Bera	7.688012	124.7878	172.8025	218.2953	13123.02	226.6788	14.28063	42866.11
Probability	0.021408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000793	0.000000
Sum	227.8125	1547.000	155.0651	263.0594	9.360000	2599.990	10667.98	196.2423
Sum Sq. Dev.	14.27817	1173.642	4.261831	19.05689	5.917844	9651.827	1028.950	88.93308
Observations	372	372	372	372	372	372	372	372

Pengungkapan IC (ICD) merupakan variabel dependen dari penelitian ini menunjukkan nilai minimum 0,167 dan nilai maksimum 1. Nilai rata-rata sebesar 0,61 dan memiliki nilai deviasi standar sebesar 0,19. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada nilai deviasi standarnya. Hal itu menunjukkan bahwa variasi data dapat dikatakan besar dimana nilai setiap sampel berada menyebar dari nilai rata-rata hitungannya.

Variabel ukuran dewan komisaris (BFSIZE) menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel BFSIZE sebesar 2,00 yang ditunjukkan oleh 47 sampel perusahaan dan nilai maksimum BFSIZE sebesar 13,00 yang ditunjukkan oleh Astra International Tbk. Rata-rata (*mean*) sebesar 4,15 menunjukkan rata-rata dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur di Indonesia sebesar 4 orang dan nilai deviasi standar sebesar 1,778.

Proporsi komisaris independen (OUT) ditunjukkan dengan hasil pembagian antara jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris secara keseluruhan yang ada di perusahaan. Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel OUT sebesar 0,25 yang ditunjukkan oleh Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan nilai maksimum OUT 0,80 ditunjukkan oleh Suparma Tbk. Rata – rata (*mean*) dari independensi dewan komisaris sebesar 0,416 yang menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki 41,6 % komisaris independen dan deviasi standar sebesar 0,107.

Variabel kepemilikan *blockholder* (BLOCK) diukur dengan hasil pembagian antara jumlah kepemilikan saham diatas 5% dengan jumlah saham yang beredar secara keseluruhan oleh perusahaan yang diterbitk di Bursa Efek Indonesia. Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel BLOCK sebesar 0,00 yang mana hanya sebesar 5 perusahaan manufaktur di Indonesia yang tidak dimiliki oleh para *blockholder* dan nilai maksimum BLOCK sebesar 1,00 yang ditunjukkan oleh Tunas Alfin Tbk. Rata – rata (*mean*) dari kepemilikan *blockholder* sebesar 0,707 dan deviasi standar sebesar 0,226.

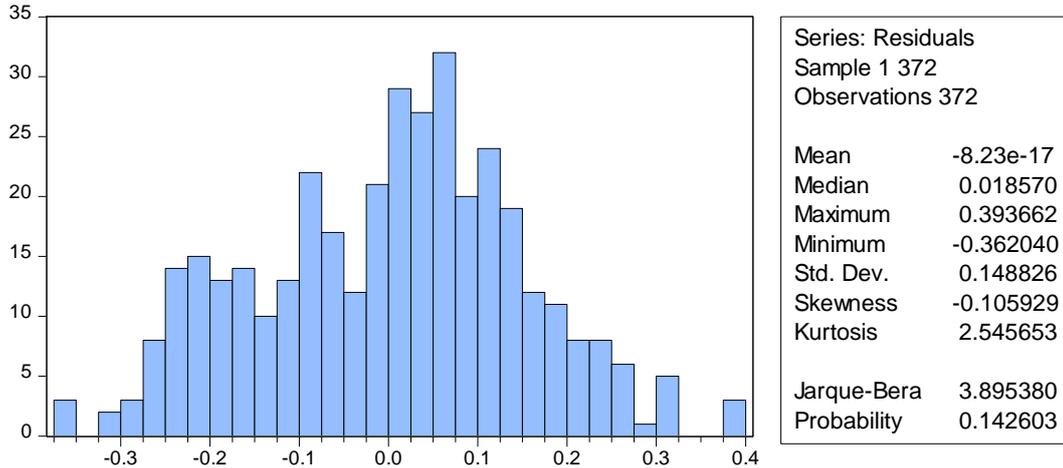
Variabel kepemilikan pemerintah (GOV) diukur dengan hasil pembagian antara jumlah kepemilikan saham diatas 5% oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan jumlah saham yang beredar secara keseluruhan oleh perusahaan yang diterbitk di Bursa Efek Indonesia. Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel GOV sebesar 0,00 yang sebagian besar perusahaan tidak dimiliki oleh pemerintah dan nilai maksimum GOV sebesar 0,807 yang ditunjukkan oleh Indofarma (persero) Tbk. Rata – rata (*mean*) dari kepemilikan pemerintah sebesar 0,025 dan deviasi standar sebesar 0,126.

Variabel masa jabatan dewan komisaris (BTENURE) dihitung berdasarkan jumlah rata-rata masa jabatan anggota dewan komisaris di perusahaan. Variabel ini menunjukkan nilai minimum variabel BTENURE sebesar 0,5 tahun yang ditunjukkan oleh PT Intekeramik Alamsari Industri Tbk. dan nilai maksimum BTENURE sebesar 28,5 yang ditunjukkan oleh Ever Shine

Textile Industry Tbk. Rata – rata (*mean*) dari Masa Jabatan Dewan Komisaris sebesar 6,989 dan deviasi standar sebesar 5,1. Nilai rata-rata yang lebih besar dari deviasi standar tersebut menunjukkan variasi data yang besar dan sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata. Nilai terbesar dari variabel BTENURE sebesar 28,5 mengindikasikan nilai variasi data yang jauh tersebar dari nilai rata-rata dan menunjukkan hasil data yang ekstrim.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**



Angka probabilitas uji jarque-bera pada penelitian tersebut menunjukkan 0,142603 yang artinya lebih besar dari 5% maka data tersebut terdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.025333	416.3050	NA
BSIZE	2.80E-05	9.395380	1.449562
OUT	0.005637	17.15740	1.061285
BLOCK	0.001918	17.37674	1.614727
GOV	0.006285	1.708524	1.643133
BTENURE	2.55E-06	3.136065	1.087876
SIZE	3.31E-05	448.6868	1.504036
LEV	0.000259	2.202278	1.017656
ROA	0.001625	1.198219	1.042075

Angka pada tabel kolom Centered VIF menunjukkan bahwa angka VIF < 10 di setiap variabel pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, angka tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dari setiap variabel yang digunakan.

**Uji Regresi Linear Berganda OLS (Ordinary Least Square) dengan HAC atau Newey West Standar Error**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.546004	0.277149	-1.970077	0.0496
BSIZE	0.022716	0.007606	2.986772	0.0030
OUT	0.059061	0.096168	0.614148	0.5395
BLOCK	-0.071120	0.066161	-1.074964	0.2831
GOV	0.245213	0.096556	2.539594	0.0115
BTENURE	-0.001945	0.002080	-0.935176	0.3503
SIZE	0.039507	0.010069	3.923793	0.0001
LEV	-0.091228	0.014106	-6.467116	0.0000
ROA	0.159479	0.042619	3.741991	0.0002
R-squared	0.424484	Mean dependent var		0.612399
Adjusted R-squared	0.411801	S.D. dependent var		0.196178
S.E. of regression	0.150457	Akaike info criterion		-0.926386
Sum squared resid	8.217315	Schwarz criterion		-0.831574
Log likelihood	181.3078	Hannan-Quinn criter.		-0.888734
F-statistic	33.46732	Durbin-Watson stat		0.737928
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic		21.27200
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Olahan Eviews 9 (Output Eviews)

Karena koefisien estimasi sudah kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas dan autokorelasi maka kedua uji tersebut dapat diabaikan.

Dengan HAC atau Newey West Standar Error maka pelanggaran autokorelasi dan heteroskedastisitas boleh tetap ada namun koefisien estimasi tidak akan mengalami bias atau terganggu karena pelanggaran tersebut. Sehingga pada HAC, asumsi keduanya dapat diabaikan. Persamaan regresi dapat dibuat dengan melihat nilai B (Koefisien Beta) pada unstandardized Coefficients. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \epsilon_i$$

$$ICD = -0.546004 + 0.022716(BSIZE) + 0.059061(OUT) - 0.071120(BLOCK) + 0.245213(GOV) - 0.001945(BTENURE) + 0.039507(SIZE) - 0.091228(LEV) + 0.159479(ROA)$$

Persamaan regresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien dari BSIZE sebesar 0.022716, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.022716.
2. Nilai koefisien dari OUT sebesar 0.059061, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.059061.
3. Nilai koefisien dari BLOCK sebesar -0.071120, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar -0.071120.
4. Nilai koefisien dari GOV sebesar 0.245213, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.245213.
5. Nilai koefisien dari BTENURE sebesar -0.001945, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar -0.001945.
6. Nilai koefisien dari SIZE sebesar 0.039507, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.039507.
7. Nilai koefisien dari LEV sebesar -0.091228, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar -0.091228.
8. Nilai koefisien dari ROA sebesar 0.159479, artinya setiap kenaikan satu tahunnya akan berpengaruh terhadap ICD sebesar 0.159479.

## Uji Hipotesis

### Uji F

Nilai P Value uji Wald pada tabel 4.7 yaitu: Probabilitas (Wald F-statistic) =  $0,000000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu pengungkapan modal intelektual secara simultan

### Uji T

Nilai prob. =  $0,0030$  atau lebih kecil dari  $0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ICD

Nilai prob. =  $0,5395$  atau lebih besar dari  $0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD

Nilai prob. =  $0,2831$  atau lebih besar dari  $0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan blockholder tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD

Nilai prob. =  $0,0115$  atau lebih kecil dari  $0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap ICD

Nilai prob. =  $0,3503$  atau lebih besar dari  $0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel masa jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai R Square menghasilkan  $0,424484$  dengan Adjusted R-squared:  $0,411801$ . Nilai tersebut menerangkan bahwa  $41,1\%$  variasi variabel dependen yaitu pengungkapan IC dapat diterangkan oleh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan komisaris sebagai variabel independen dalam model regresi. Serta SIZE, leverage, ROA sebagai variabel kontrol juga terikat dalam penjelasan dari variabel dependen, sedangkan  $58,9\%$  sisanya diterangkan oleh faktor lain diluar model.

### Pembahasan Hasil dan Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian variabel pertama sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfraih (2018), Abeysekera (2019), Rodrigues *et al.*, (2016) dan Ahmed Haji & Ghazali (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan menyatakan bahwa dengan lebih besarnya jumlah anggota dewan di perusahaan akan meminimalkan asimetri informasi.

Hasil pengujian variabel kedua menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, dkk (2014) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual karena dalam praktiknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen, sehingga walaupun dewan komisaris independen telah ada namun tidak diketahui bagaimana penunjukkannya.

Hasil pengujian variabel ketiga menunjukkan pengaruh negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oliveira *et al.* (2006) dan White *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa *blockholder* mungkin tidak melobi manajemen dan dewan untuk akuntabilitas yang lebih besar yang menyebabkan masalah agensi.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Firer & Williams (2015), Gan *et al.*, (2013), dan Ahmed Haji & Mohd Ghazali (2013). Penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi yang lebih luas yang mana selain itu selain dapat menarik investor, pemerintah juga dapat melihat kondisi masyarakatnya sendiri mengenai bagaimana pengembangan sumber daya manusianya.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handajani *et al.*, (2014), Vafeas (2003), dan Byrd *et al.*, (2010). Mereka menyatakan bahwa semakin singkat masa jabatan dewan komisaris akan berpengaruh terhadap semakin tinggi pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR bersifat voluntarym yang mana memiliki sifat yang sama dari pengungkapan IC. Dari kondisi yang terjadi di Indonesia sebagian perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih luas dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi pergantian anggota dewan komisaris dalam periode berjalan tanpa melihat lamanya waktu dari anggota dewan

komisaris, maka perusahaan akan tetap memperbaiki laporan tahunan yang diterbitkan di perusahaan tersebut.

### KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan IC. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2018 secara berturut-turut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel perusahaan dari berbagai industri yang ada di Indonesia

Berdasarkan framework yang dijalankan oleh (Guthrie *et al.* 2004) dan diaplikasikan kembali oleh (Whiting & Miller, 2008) dan (Alfraih, 2018) untuk mengetahui tingkat dari pengungkapan IC, penelitian ini menggunakan analisis konten dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018. Kemudian hubungan antara pengungkapan IC dan kelima hipotesis diuji menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IC. Sementara, di dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa independensi dewan komisaris, kepemilikan blockholder dan masa jabatan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap IC.

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0.411801 atau sebesar 41,1% menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan IC dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan, independensi dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah dan masa jabatan dewan komisaris, sedangkan sisanya 58,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel dalam model penelitian, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum terdapat dalam penelitian ini seperti jenis kelamin dewan komisaris, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial serta kepemilikan perorangan atau individu.

### REFERENSI

- Abdul Rashid, A., Kamil Ibrahim, M., Othman, R., & Fong See, K. (2012). IC disclosures in IPO prospectuses: evidence from Malaysia. 13(1), 57-80. doi:10.1108/14691931211196213
- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4), 504-518. <https://doi.org/10.1108/14691931011085650>
- Abeysekera, I., & Guthrie, J. (2005). An empirical investigation of annual reporting trends of intellectual capital in Sri Lanka. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 151-163. doi:10.1016/s1045-2354(03)00059-5
- Ahmed Haji, A., & Mohd Ghazali, N. A. (2013). A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 21(1), 27-52. doi:10.1108/13217341311316931
- Albassam, W. (2014). Corporate Governance, Voluntary Disclosure and Financial Performance: An Empirical Analysis of Saudi Listed Firms Using A Mixed-Methods Research Design. (PhD ), University of Glasgow. PhD thesis.
- Alcaniz, L., Gomez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2015). Firm characteristics and intellectual capital disclosure in IPO prospectuses. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 28(4), 461-483. doi:10.1108/arla-09- 2014-0134
- Alfraih, M. M. (2018). The role of corporate governance in intellectual capital disclosure. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(1), 101-121. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2017-0026>
- Anam Ousama, A., Fatima, A. H., & Rashid Hafiz-Majdi, A. (2012). Determinants of intellectual capital reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 2(2), 119-139. doi:10.1108/20421161211229808
- Bebchuk, L. A., & Cohen, A. (2003). The Costs of Entrenched Boards. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.556987

- Berberich, G., & Niu, F. (2011). Director Busyness, Director Tenure and the Likelihood of Encountering Corporate Governance Problems. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1742483
- Bonazzi, L., & Islam, S. M. N. (2007). Agency theory and corporate governance: A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. 2(1), 7-23. doi:10.1108/17465660710733022
- Bozzolan, S., O'Regan, P., & Ricceri, F. (2006). Intellectual capital disclosure (ICD). *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(2), 92-113. doi:10.1108/14013380610703111
- Branco, M. C., Kapardis, M. K., Delgado, C., Sá, M., & Sousa, C. (2010). An analysis of intellectual capital disclosure by Portuguese companies. *EuroMed Journal of Business*, 5(3), 258-278. doi:10.1108/14502191011080809
- Brüggen, A., Vergauwen, P., & Dao, M. (2009). Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia. *Management Decision*, 47(2), 233-245. doi:10.1108/00251740910938894
- Byrd, J., Cooperman, E. S., & Wolfe, G. A. (2010). Director tenure and the compensation of bank CEOs. *Managerial Finance*, 36(2), 86-102. doi:10.1108/03074351011014523
- Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: An analysis of European biotechnology companies. In *European Accounting Review* (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/09638180701707011>
- CFA. (2007). A Comprehensive Business Reporting Model: *Financial Reporting for Investors*. Standards and Position Papers.
- Cooke, T. E. (1989). Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 1(2), 171- 195. doi:10.1111/j.1467-646X.1989.tb00009.x
- Dhillon, A., & Rossetto, S. (2009). Corporate control and multiple large shareholders. Working Paper. Coventry: University of Warwick, Department of Economics. Warwick economic research papers (No.891). Available at: <http://wrap.warwick.ac.uk/1326/> (accessed 3 November 2016).
- Donnelly, R., & Mulcahy, M. (2008). Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. *Corporate Governance: An International Review*, 16(5), 416-429. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00692.x>
- Dou, Y., Hope, O.-K., Thomas, W. B., & Zou, Y. (2016). Individual Large Shareholders, Earnings Management, and Capital-Market Consequences. *Journal of Business Finance & Accounting*, 43(7-8), 872-902. doi:10.1111/jbfa.12204
- Edmans, A. (2014). Blockholders and Corporate Governance. *Annual Review of Financial Economics*, 6(1), 23-50. doi:10.1146/annurev-financial-110613-034455
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1). doi:10.2307/258191
- Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331-356. doi:10.1111/corg.12095
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325-345. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(03\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(03)00037-1)
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325. doi:10.1086/467037
- FASB. (2001). Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures. *The Financial Standards Accounting Boards*.
- Fauzi, F. (2012). Equity Ownership and Capital Structure Determinants: A Study of New Zealand-Listed Firms. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.2047218
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Financial Fraud, Director Reputation, and Shareholder Wealth. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.687412
- Firer, S., & Williams, S. M. (2015). Firm ownership structure and intellectual capital disclosures. *South African Journal of Accounting Research*, 19(1), 1-18. doi:10.1080/10291954.2005.11435116

- Firth, M., Peter M. Y. Fung, dan Oliver M. Rui, 2008, Ownership, governance mechanisms, and agency cost in China's listed firms, *Journal of Asset Management*, vol. 9, no. 2, pp 90 - 101.
- Gamerschlag, R. (2013). Value relevance of human capital information. *Journal of Intellectual Capital*, 14(2), 325-345. doi:10.1108/14691931311323913
- Gan, K., Saleh, Z., Abessi, M., & Huang, C. C. (2013). Intellectual capital disclosure in the context of corporate governance. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 10(1). doi:10.1504/ijlic.2013.052077
- Guthrie, J., & Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. *Journal of Intellectual Capital*, 1(3), 241–251. <https://doi.org/10.1108/14691930010350800>
- Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., & Ricceri, F. (2004). Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting. *Journal of Intellectual Capital*, 5(2), 282-293. doi:10.1108/14691930410533704
- Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 21(1), 27–52. <https://doi.org/10.1108/13217341311316931>
- Handajani, L., Subroto, B., Sutrisno, T., & Saraswati, E. (2014). Does board diversity matter on corporate social disclosure? An Indonesian evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5, 8-16.
- He, J., Mahoney, J. T., & Wang, H. C. (2009). Firm capability, corporate governance and competitive behaviour: a multi-theoretic framework. *International Journal of Strategic Change Management*, 1(4). doi:10.1504/ijscm.2009.031408
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Hidalgo, R. L., García-Meca, E., & Martínez, I. (2011). Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0692-x>
- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604- 619. doi:10.1108/02686900710759406
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3). doi:10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Keenan, J., & Aggestam, M. (2001). Corporate governance and intellectual capital: Some conceptualisations. *Corporate Governance*, 9(4), 259–275. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00254>
- Kothari, S. P. (2005). Capital Markets Research in Accounting. *SSRN Electronic Journal*, 617. <https://doi.org/10.2139/ssrn.235798>
- Kruger, P. (2010). Corporate Social Responsibility and the Board of Directors. [www.sfgeneva.org/doc/110317\\_kruegerCsrandBoard.pdf](http://www.sfgeneva.org/doc/110317_kruegerCsrandBoard.pdf). Accessed on January 2013
- Li, J. (1994). Ownership structure and board composition: A multi-country test of agency theory predictions. *Managerial and Decision Economics*, 15(4), 359-368. doi:10.1002/mde.4090150409
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137–159. <https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663326>
- Mak, Y. T., & Li, Y. (2001). Determinants of corporate ownership and board structure: evidence from Singapore. *Journal of Corporate Finance*, 7(3), 235-256. doi:10.1016/s0929-1199(01)00021-9
- Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures By U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 26(3), 555-572. doi:10.1057/palgrave.jibs.8490186
- Nelson, S. P., dan Nurul Farha Mohammed-Rusdi, 2015, Ownership structure influence on audit fee, *Journal of Accounting in Emerging Economies*, vol. 5, no. 4, pp 457 - 478.

- OECD. (2012). Corporate Reporting of Intangible Assets: *A Progress Report*.
- Oliveira, L., Lima Rodrigues, L., & Craig, R. (2006). Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(1), 11-33. doi:10.1108/14013380610672657
- Petty & Cuganesan. (2005). *Voluntary Disclosure of Intellectual Capital By Hong Kong Companies: Examining Size, Industri and Growth Effects Over Time*. doi:10.1111/j.1835-2561.2005.tb00291.x
- Purnomosidhi, B. (2006). Analisis Empiris Terhadap Ditirminan Pengungkapan Modal Intelektual Pada Perusahaan Publik BEJ.
- Puspita, T. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009*. 1–64.
- Rodrigues, L. L., Tejedo-Romero, F., & Craig, R. (2016). Corporate governance and intellectual capital reporting in a period of financial crisis: Evidence from Portugal. *International Journal of Disclosure and Governance*, 14(1), 1-29. doi:10.1057/jdg.2015.20
- Rosenstein, S., & Wyatt, J. G. (1990). Outside directors, board independence, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*, 26(2), 175-191. doi:10.1016/0304-405x(90)90002-h
- Schuster, P., & O'Connel, V. (2006). The Trend Toward Voluntary Corporate Disclosures. *Management Accounting Quarterly*, 7(2), 1-9.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*, 94(3), 461–488.
- Sinaga, A. L., & Sudarno. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 7, Issue 4).
- Sundaramurthy, C., Mahoney, J. M., & Mahoney, J. T. (1997). Board Structure, Antitakeover Provisions, and Stockholder Wealth. *Strategic Management Journal*, 18(3), 231-245. doi:10.1002/(sici)1097-0266(199703)18:33.0.Co;2-v
- Susilowati, Y., Wachid, N., Aini, N., dan Anggana, L. 2015. Konsekuensi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pengungkapan, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Komisararis Independen terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. *Management Dynamics Conference*.
- Sveiby, K. E. (1997). The Intangible Assets Monitor. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 2(1), 73-97. doi:10.1108/eb029036
- Vafeas, N. (2003). Length of Board Tenure and Outside Director Independence. *Journal of Business Finance Accounting*, 30(7-8), 1043-1064. doi:10.1111/1468-5957.05525
- Watson, A., Shrivies, P. and Marston, C. 2002. "Voluntary Disclosure of Accounting Ratios in The UK", *British Accounting Review*, Vol. 34 No. 4, pp. 289-313
- White, G., Lee, A., & Tower, G. (2007). Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies. *Journal of Intellectual Capital*, 8(3), 517-537. doi:10.1108/14691930710774894
- Whiting, R. H., & Miller, J. C. (2008). *Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the "hidden value."* <https://doi.org/10.1108/14013380810872725>
- Whiting, R. H., & Woodcock, J. (2011). Firm characteristics and intellectual capital disclosure by Australian companies. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 15(2), 102-126. doi:10.1108/14013381111157337
- Widiyaningrum, A. (2004). Widiyaningrum 2014 - Intellectual Capital.Pdf. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 1, pp. 16–25).